

# Refleksi Polri Awal Tahun 2001

## Cara "Macan Asia" Membangun Polisi yang Kuat

Oleh: Anton Tabah

Sedikitnya ada lima unsur penopang utama dalam membangun kepolisian yang kuat di suatu negara. Mutu, kesejahteraan, jumlah, sarana prasarana dan sistem politik negara adalah kelima unsur itu. Mana yang harus menjadi skala prioritas, peringkat-peringkatnya harus disurvei oleh negara.

Pengalaman negara-negara kuat dan maju dalam membangun kepolisian hanya referensi. Mungkin dalam membangun kepolisian yang kuat di Indonesia urutan-urutan lima unsur di atas sudah sangat tepat. Untuk saat ini yang perlu diutamakan adalah membangun kesejahteraan Polri, bukan jumlah personel.

Analisis ini sebagai tanggapan atas statemen Presiden RI Gus Dur ketika mengunjungi Markas Brimob Polri, Kelapa Dua Jakarta, 2 Maret 2000; *"Kelemahan Polri selama ini karena jumlah personennya sangat kurang belum mencapai 1% dari jumlah penduduk Indonesia padahal salah satu syarat polisi kuat di suatu negara, jumlah personennya minimal 3% dari jumlah penduduk"*. Pernyataan tersebut menarik bukan hanya karena bangsa Indonesia sedang menghadapi paradigma baru tapi pernyataan seperti belum pernah diutarakan petinggi negara sebelumnya. Karenanya perlu dicermati dengan kearifan mendalam.

Apakah setelah jumlah prajurit Polri mencapai 3% dari penduduk otomatis kinerjanya akan lebih baik dan kuat? Masih banyak permasalahan

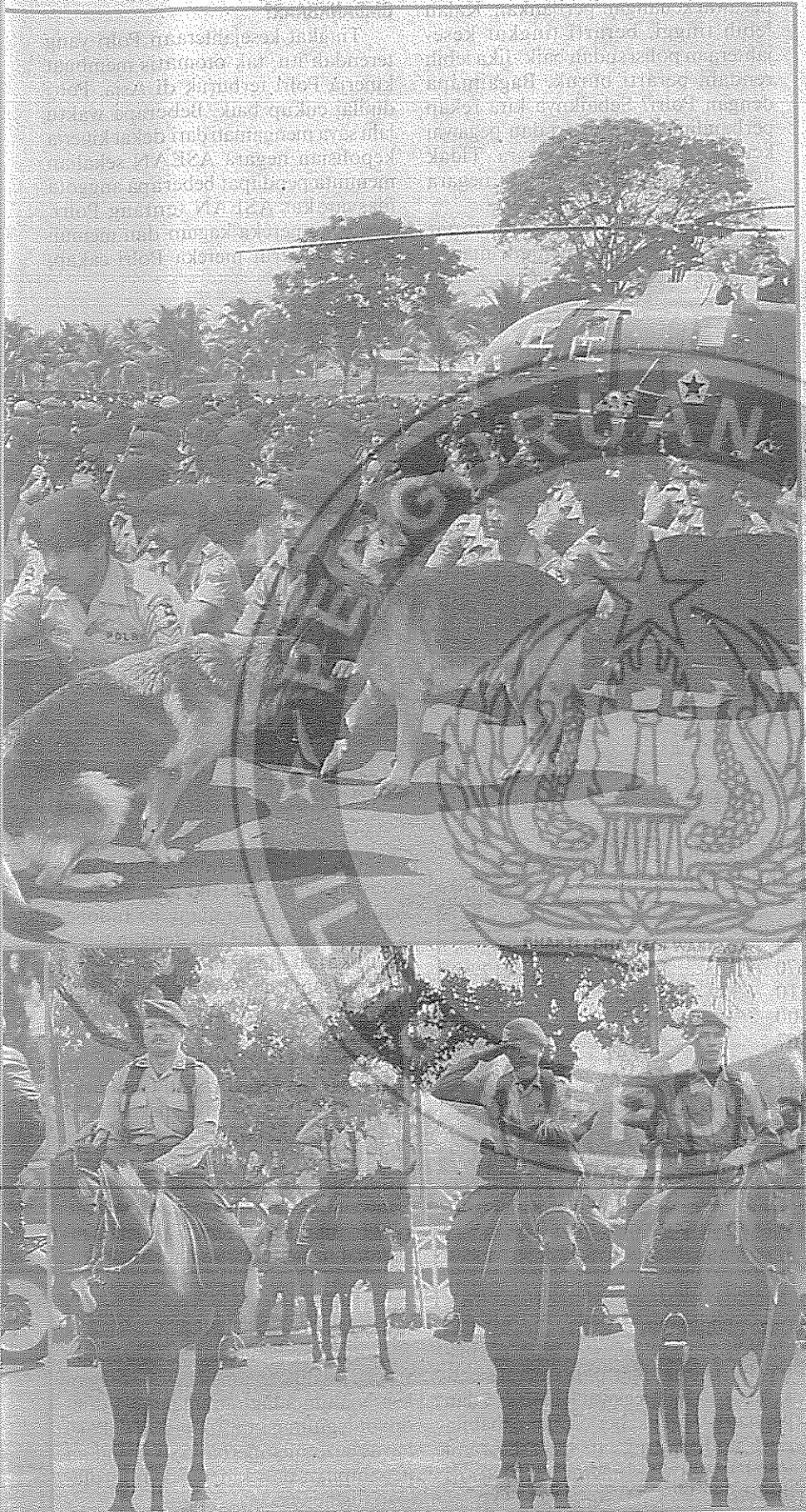
yang harus digarap oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja Polri menyangkut hal-hal yang cukup prinsip seperti SDM, anggaran, sarana prasarana dan kesejahteraan yang standarnya telah dirumuskan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Begitu spesifik masalah polisi sehingga SDM, kesejahteraan, dan personel ideal minimal ditentukan PBB.

Kenyataan *ratio* jumlah Polri saat ini yang terkecil di dunia di banding dengan sesama negara ASEAN sekalipun. Tapi dari sekian permasalahan Polri, mana yang harus diprioritaskan? Apakah sarana Polri atau kesejahteraan prajurit Polri atau jumlah personennya? Gus Dur harus mendapat bisikan (masukan) yang jelas. Kalau tidak nanti malah menjadi beban Polri sendiri.

Kini saat yang tepat untuk mengangkat kembali masalah Polri setelah mendapat perhatian besar dari presiden dan masyarakat dalam memenuhi standar PBB setelah "dilemahkan" lebih dari tiga dekade. Namun apakah kelemahan Polri telah memperburuk kinerjanya?

Ada pernyataan Pastor asal Jerman, Frans Magnis Suseno merentang pengalamannya yang belum pernah sekalipun dikecewakan oleh Polri.





Bahkan terkesan cara kerja Polri cekatan, tanggap sebagai pelayanan publik. Berbeda pengalamannya di negara lain, menurutnya polisi sering mengecewakan. Tentu saja pengalaman ini belum menjadi syarat survai karena sebuah penelitian memerlukan variabel yang rumit. Namun setidaknya dapat dijadikan acuan analisis.

Pengalaman Romo Frans ini pasti juga banyak dirasakan orang lain, tapi biasanya, tak pernah ada publikasi mengenai yang dipuaskan oleh kerja polisi. Justru yang mengalami kekecewaan yang sering mendapat publikasi luas. Sebab itu Romo Frans menyarankan agar tulisan tentang Polri diperbanyak oleh polisi sendiri dan disosialisasikan secara transparan, guna mengubah sikap apriori masyarakat menjadi koperatif, antipati menjadi empati.

**CONTOH "MACAN ASIA"**

Diskusi meluas sampai ke masalah masyarakat "sakit" pada birokrasi yang sakit. Sebuah analogi pun dikaji, bagaimana kalau pasien dirawat oleh dokter yang sakit? Inilah Indonesia, rakyat yang sakit dipimpin oleh pemimpin sakit. Apa jadinya? Kita telah sama-sama saksikan Indonesia yang semakin *centhang-perenang*. Tetapi karena konteksnya polisi, diskusi pun terfokus. Kalau polisi sakit di tengah masyarakat sakit siapa yang mesti menyetatkan? Polisi menyetatkan masyarakat atau masyarakat menyetatkan polisi? Frans mengemukakan kedua-keduanya polisi dan masyarakat harus saling menyetatkan.

Hal itu bukan solusi efisien. Seperti solusi-solusi sebelumnya, semuanya merupakan "lingkaran setan". Ada solusi tegas, jelas, lugas. Polisilah yang harus menyetatkan masyarakat. Caranya?

Negara-negara yang kini berdisiplin tinggi yang sering dijuluki "Macan Asia" pada mulanya juga mempunyai pengalaman sama dengan Indonesia. Disiplin masyarakat buruk karena polisinya buruk termasuk Amerika, Eropa dan Asia. Mereka mempunyai referensi yang sama. Polisi berperan penting dalam mendisiplinkan masyarakat, karena di tangan polisi Undang-undang menjadi hukum yang hidup. Sebaliknya tanpa polisi yang kuat, UU menjadi barang mati. Solusi mereka, polisi harus kuat dan tangguh beberapa

langkah di depan masyarakatnya. Karena itu, sebaliknya kita belajar dengan negara Asia yang memiliki tingkat disiplin tinggi seperti Singapura, Jepang, Taiwan dan Hongkong yang sering disebut sebagai "Macan Asia".

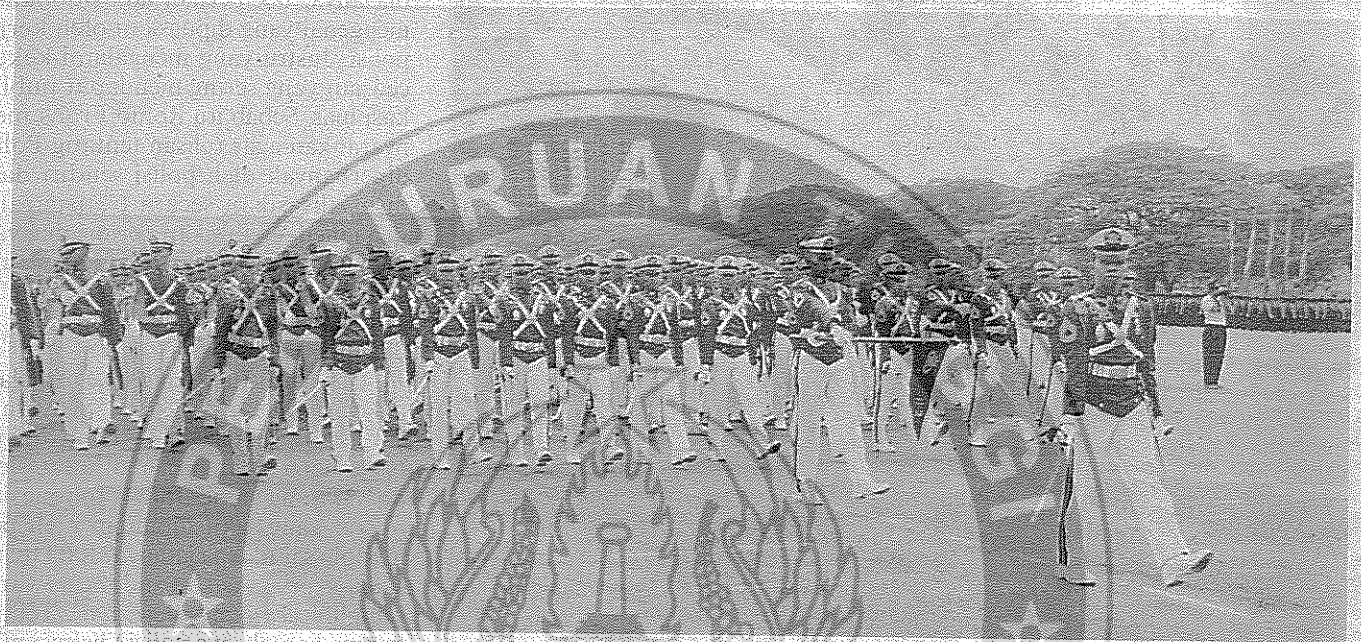
Singapura dua dekade yang silam disiplinnya masih buruk. Polisinya buruk, penyalahgunaan wewenang merajalela. Hasil survai ternyata dise-

pegawai keuangan/perbankan. Kalau lebih tinggi, berarti tingkat kesejahteraan polisi sudah baik. Jika lebih rendah, berarti buruk. Bagaimana dengan Polri? Sebaiknya kita rekap perbandingan gaji Polri dan pegawai keuangan di berbagai negara. Tidak usah jauh-jauh. Di beberapa negara Asia saja seperti dalam tabel.

Terlihat dari data ini, empat negara urutan atas menjadi macan

**OMDANKBAAR?**

Tingkat kesejahteraan Polri yang terendah itu, tak otomatis membuat kinerja Polri terburuk di Asia. Polri dinilai cukup baik. Beberapa waktu lalu saya mengamati dari dekat kinerja kepolisian negara ASEAN sekalian meminta pendapat beberapa anggota masyarakat ASEAN tentang Polri. Ternyata mereka kagum dan memuji Polri. Menurut mereka Polri cakap,



**Gaji Pegawai Keuangan dan Polisi Pangkat Terendah dari Masa Kerja Nol Tahun**

NO	NEGARA	PEG. KEUANGAN	POLISI	KETERANGAN
1	Hongkong	724	1.323	182 %
2	Jepang	1. 670	1.890	112 %
3	Singapura	510	515	101 %
4	Taiwan	500	500	100 %
5	Malaysia	567	256	45 %
6	Thailand	253	137	42 %
7	Indonesia	233	63	26 %

babkan tingkat kesejahteraan polisi rendah. Solusinya, menaikkan kesejahteraan/gaji polisi lebih tinggi dari gaji pegawai keuangan dan sarana. Solusi tersebut tepat. Mulai satu dekade silam Singapura sudah menjadi parameter disiplin Asia Tenggara. Pengalaman serupa dialami Hongkong. Gaji polisi dinaikkan dua kali lipat lebih tinggi ketimbang gaji pegawai keuangan negaranya.

Rangkaian pengalaman ini adalah wujud kepedulian negara-negara pada standar PBB terhadap kesejahteraan polisi, diukur perbandingan gaji

Asia karena berdisiplin tinggi. Kesejahteraan polisi sangat baik, dengan gaji di atas gaji keuangan/perbankan. Sedangkan tiga negara urutan bawah masih dalam kondisi kesejahteraan polisi yang rendah. Malaysia dan Thailand sudah 40% dari gaji keuangan dan perbankan.

Tetapi yang sangat mencolok justru Indonesia, gaji polisi hanya berkisar 25% gaji pegawai keuangan dan perbankan. Tak berlebihan apabila ada prediksi tingkat kesejahteraan Polri terendah di Asia, bahkan di dunia.

cekatan, dan lebih ramah ketimbang polisi mereka. Dikuatkan oleh pengalaman ketika berkunjung ke Indonesia selalu dibantu Polri dengan tepat. Rangkaian pengalamannya yang hampir sama dengan Romo Magnis, direkam baik dalam hati sanubari mereka.

Apabila oleh masyarakatnya sendiri Polri dicemooh, hanyalah adagium, terjadi di mana saja. Masyarakat selalu tak puas dengan polisinya sendiri, mengkristal dalam opini. Eropa ada ungkapan "omdankbaar". Profesi yang tak kenal mendapat ucapan terimakasih kecuali cacian, umpatan dan cemooh. Semacam ungkapan klasik dari leluhur, "Kalau saya salah tak seorang pun lupa, tetapi kalau saya baik tak seorang pun ingat". Rasanya pas benar, kalau ungkapan seperti itu diucapkan oleh seorang polisi. Namun adagium ini jangan dijadikan legitimasi untuk *nglokro*. Polri harus terus memperbaiki sikap dalam penampilan dan kinerja demi profesionalismenya.

Namun dari hasil survei ternyata bukan Polri yang buruk. Tapi kesisteman yang telah mengkondisikan demikian. Muncul kesadaran politik untuk mendepankan Polri. Sebuah kesadaran yang nyaris terlambat. Kalau polisi buruk dicari penyebabnya, mengapa polisi buruk. Lalu diperbaiki. Kalau polisi lemah dicari penyebabnya, mengapa lemah. Lalu dikuatkan. Bukan sistem yang diubah seperti pengalaman masa lalu. Bagaimanapun, Polri memang harus di depan sesuai tuntutan zaman.

Perubahan kesadaran politik semacam ini hendaknya dikemas secara transparan ke dalam GBHN dan kalau perlu dalam amandemen UUD' 45. Kemauan politik menjadi realita apabila peningkatan pembangunan Polri diprioritaskan dalam peta pembangunan nasional untuk mewujudkan prasyarat penting dan segala yaitu. Polri harus kuat dan sehat terlebih dahulu sebelum masyarakatnya. Untuk itu perlu komitmen politik yang konsisten.

Komitmen politik harus diartikan lebih makro. Sistem/politik kesamaan di mata hukum, kepastian hukum, harus diapresiasi secara tegas.

Faktanya, hukum kita masih mendua. Masih ada perbedaan perlakuan hukum terhadap pejabat negara, anggota dewan, pegawai negeri, dan profesi tertentu, inkonsistensi. Diskriminasi ini akan menyulitkan aplikasi penegakan hukum ada memuat masyarakat tidak sehat menular tatanan sosial. Untuk mengubah 'tatanan' yang sudah mendarah daging ini perlu kesadaran politik guna menyetatkan tatanan tersebut.

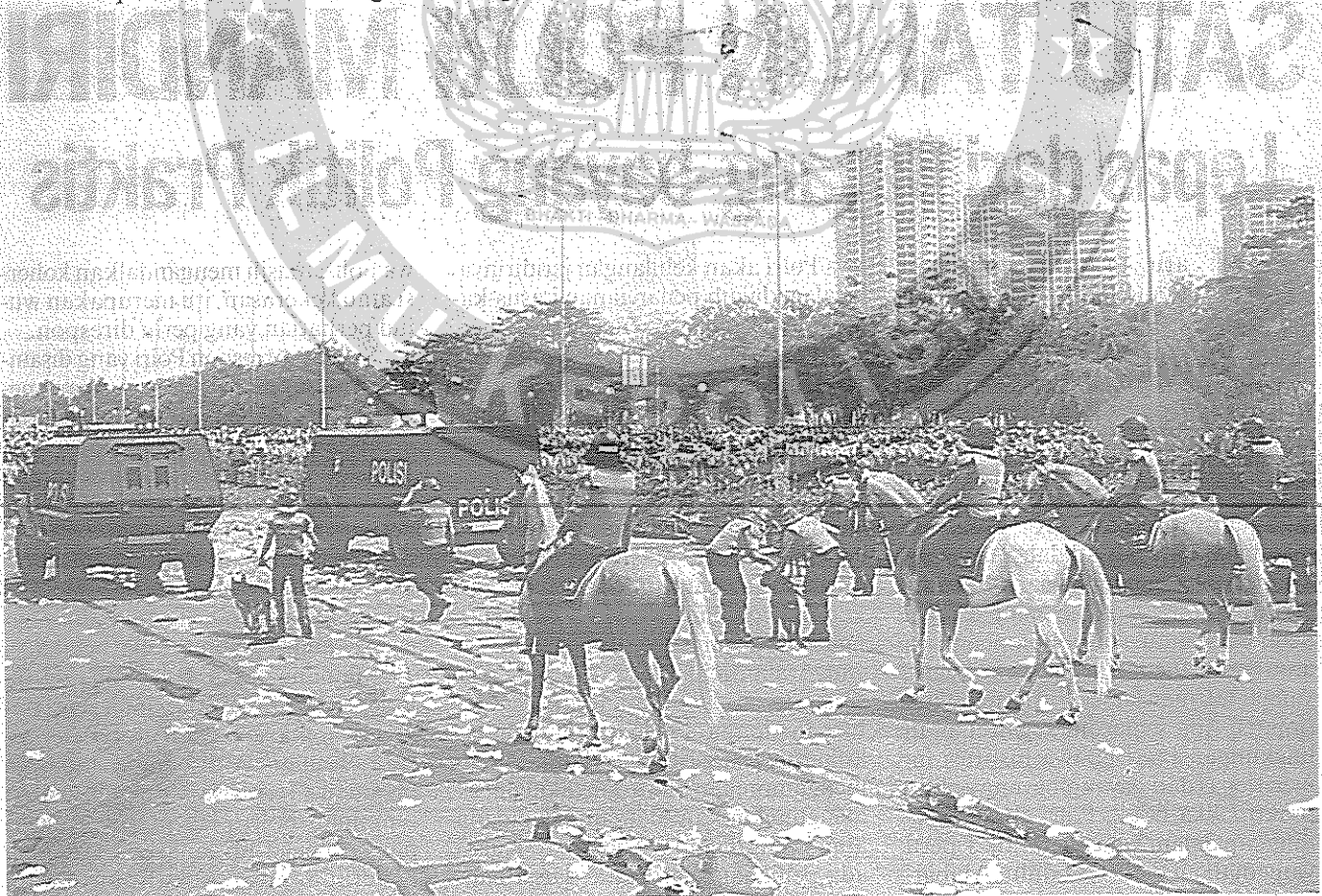
Kesadaran politik macam ini tidak terjadi secara otomatis. Internalisasi melalui tulisan dan buku tentang kepolisian dan pembangunan Kamtibmas menjadi kontribusi penting di abad informasi ini.

Sayangnya, selain belum banyak buku dan tulisan tentang Polri juga jarang sekali anggota Polri yang mau menulis. Padahal sebetulnya mungkin, anggota Polri yang mampu menganalisis dengan baik cukup banyak, tetapi mereka ketakutan dengan sistem pembinaan karier Polri selama ini. Menempatkan personel-personel yang bagus analisisnya cuma di staf dan tidak dipromosikan di lapangan operasional. Mungkin inilah yang menghantui anggota Polri selama ini.

Untuk mengubah "momok" tersebut dan menumbuhkan motivasi anggota, diperlukan kearifan dari para petinggi Polri.

Setelah Polri tidak satu wadah dengan TNI dan langsung bertanggung jawab pada presiden, apa benar telah memiliki otoritas luas. Misalnya saja memenuhi rasio jumlah Polri, sarana dan kesejahteraan polisi sesuai standar PBB. Ternyata belum juga. Pembangunan Polri ke depan yang kuat sampai kini masih berupa kerangka. Lima unsur penopang pembangunan Polri yang disyaratkan PBB di atas juga belum menyentuh Polri.

Kaum reformis yang tak mengerti apa-apa tentang kepolisian berteriak lantang. Menuduh Polri tak berubah, Polri tak reformis. Padahal selama ini nyaris baru masalah re-organisasinya yang direvisi. Bahkan masalah teknis operasional Polri saat ini menghadapi tantangan yang serius. Selama setahun pemerintahan Gus Dur, intervensi ke dalam Polri malah semakin nyata. Kita masih bersyukur mempunyai Kapolri yang tegas, baik Jenderal Rusdihardjo maupun Jenderal Bimantoro tak mau diintervensi oleh presiden dan oleh siapa pun. ■





# SATU TAHUN POLRI MANDIRI

## Lepas dari Bayang-bayang Politik Praktis

**S**atu tahun Kepolisian Republik Indonesia secara struktural mandiri. Tentu saja dalam proses waktu yang relatif singkat itu masih banyak yang harus dibenahi dalam institusi Polri sehingga visi dan misinya sesuai harapan masyarakat menjadi lembaga profesional.

Salah satu faktor "X" yang kini mendapat sorotan adalah menyangkut pertanyaan mau kemana Polri setelah mandiri. Apakah mau sebagai kenderaan atau alat politik penguasa atau benar-benar polisi yang tegar, yang tidak mau terseret urusan politik praktis. Ada semacam keagairahan di lingkungan Polri bahwa institusi ini mesti lepas dari bayang-bayang politik praktis. Jika tidak, Polri akan terperangkap dalam kancah politik seperti yang dialami oleh TNI dulu. Akibat-

nya Polri akan kehilangan jatidirinya, apalagi dalam penanganan kasus-kasus yang sifatnya sensitif atau bermuatan politis. Dengan memegang prinsip hanya tunduk dan menjalankan undang-undang, maka beban beratnya berdiri paling depan dalam mengatasi gangguan kamtibmas akan diemban dengan baik.

Bahwasanya dalam setahun usia polisi mandiri, masih ada sorotan masyarakat yang mempertanyakan keprofesionalan polisi dalam menangani berbagai persoalan, menjadi hal yang wajar. Kinerjanya memang masih perlu ditingkatkan, terutama berkaitan dengan kemampuan melakukan investigasi, penyelidikan, dan mengumpulkan bukti dan fakta untuk mengungkapkan suatu tindak pidana atau kasus dalam masyarakat. Kalau ada penilaian sementara warga bah-

wa polisi masih mengandalkan koherensi atau kekerasan, itu merupakan wujud perhatian yang perlu direpson.

Salah satu respon Polri yang disambut masyarakat adalah dengan mengedepankan dialog dan negosiasi dalam menghadapi unjuk rasa. Tim negosiator Polri dinilai mampu meredakan emosi massa. Kreasi-kreasi seperti itu perlu dikedepankan Polri ketika berhubungan dengan masyarakat, sehingga polisi sebagai sahabat rakyat benar-benar nyata, bukan hanya sekadar penghias bibir belaka.

Memang sukar bagi Polri untuk terlepas begitu saja dari intervensi politis. Karena sebagai alat negara, secara otomatis Polri berada di bawah presiden. Tentu saja pengangkatan pimpinan Polri oleh presiden mempunyai pengaruh langsung terhadap keberadaannya, sekalipun dalam

mengangkat atau memperhentikan harus melalui persetujuan DPR. Ini terbukti dengan kurun waktu tiga tahun terakhir ini tidak kurang tiga kali pergantian pimpinan telah dilakukan.

Dalam posisi seperti ini Polri mesti berhati-hati dan tetap pada jalurnya sebagai polisi profesional. Agar Polri menjadi lembaga yang solid maka hendaknya tidak mau terseret ke politisasi jabatan. Prinsip mengutamakan dan menjunjung tinggi kehormatan lembaga yang membesarkan kita, perlu tertanam dalam sanubari polisi Indonesia.

Di samping tuntutan kemandirian Polri masih ada beberapa kinerja polisi yang mendapat sorotan dari masyarakat, misalnya pelayanan masyarakat. Hal ini pernah diakui mantan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mulyono Sulaiman yang mengakui jajaran Polda Metro Jaya masih belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Mulyono itu terjadi karena masih banyak anggotanya yang belum menghayati dan menjiwar tugas pokok seorang polisi, yaitu melindungi dan mengayomi masyarakat serta menjadi penegak hukum. Bukan hanya kritik dari masyarakat saja tapi ada juga yang memuji kerja polisi dalam mengamankan Jakarta.

Sekalipun proses kinerja polisi ada yang dinilai negatif, namun ada sebagian masyarakat mempunyai penilaian membaik terhadap sikap dan hasil kerja polisi dalam melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. Sayangnya, hasil kerja ini dinodai oleh masih kuatnya anggapan di benak sebagian masyarakat yang menyatakan berurusan dengan polisi pasti akan mengeluarkan ongkos yang tidak jelas peruntukannya. Meski demikian Polri berharap mampu memperbaiki kinerja dalam upaya menegakkan hukum yang selama masa Orde Baru yang banyak diintervensi pihak tertentu.

#### PEMISAHAN POLRI DARI DEPHAN

Terhitung sejak 1 Juli 2000, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) secara resmi pisah dari Departemen Pertahanan Republik Indonesia (Dephan). Dalam proses menuju kemandirian Polri, Polri berada dalam naungan Dephan, setelah lepas dari ABRI (kini TNI) per 1 April 1999. Pemisahan dari

Dephan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 89/2000. Ketika memberikan sambutan dalam upacara peringatan hari Bhayangkara ke-54 di Lapangan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan setelah pisah dari Dephan, Polri selanjutnya akan berada langsung di bawah wewenang Presiden.

Dengan demikian Kapolri juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden, seperti tertuang dalam pasal 2 butir 3 Keppres No. 89/2000. Sedangkan bentuk lembaga Polri nantinya akan mengikuti sistem komando (kepolisian nasional) seperti sekarang atau akan mengikuti sistem UU No. 22/1999.

Menurut Presiden, landasan hukum pemisahan Polri dari Dephan sekarang memang masih kurang karena baru berupa Keppres. Karena itu, Presiden meminta supaya dalam waktu dekat selambat-lambatnya enam bulan sudah ditetapkan landasan yang lebih kokoh berkaitan dengan susunan dan kedudukan Polri, dengan menghadirkan Undang-undangan (RUU) pengganti UU No. 28/1997 tentang Polri.

Mantan Deops Polri Koesparmono Irsan menyambut baik keputusan Presiden tentang pemisahan Polri dari Dephan enam bulan lebih cepat dari rencana semula. "Di mana pun polisi itu memang harus mandiri. Dalam bekerja, polisi tidak boleh diintervensi oleh siapa pun," ujar Koesparmono. Meski demikian, Koesparmono yang

juga anggota Komnas HAM itu merasa masih terganggu dengan pernyataan Presiden mengenai bentuk lembaga Polri. Sedangkan masalah otonomi daerah tidak harus mengubah bentuk Polri menjadi kepolisian federal yang harus berada di bawah pemerintah daerah. "Boleh saja Kapolda dan Kapolres dipilih DPRD, tetapi usulan tetap harus dari Kapolri," katanya.

Sebelum Keppres No. 89/2000 tentang pemisahan Polri dari Dephan, keluarlah Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Dalam Bab II pasal 6(1) dinyatakan bahwa Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional (2). Dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan Polri merupakan Kepolisian Nasional yang organisasinya disusun berjenjang dari tingkat pusat sampai daerah. Kepolisian Negara RI berada di bawah Presiden (ayat 2), Polri dipimpin oleh Kapolri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (3).

Nah, tentu saja yang perlu mendapat perhatian dari institusi Polri adalah dalam pasal 10 (1) yang berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada





ban masyarakat mengharuskan kehadiran polisi berada di tengah-tengah masyarakat. Misalnya saja peran dan kehadiran-kehadiran yang konkret dengan menolong orang yang membutuhkan pertolongan sesegera mungkin. Memang tidak mudah merealisasikan semua itu. Apalagi jika melihat di sepanjang era kemandiriannya, sejak setahun tahun lalu, Polri terlihat belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan masyarakat. Jangankan mengatasi kerusuhan di berbagai daerah, memburu Tommy Soeharto yang begitu populer dan terkenal saja Polri seakan tak berdaya.

Lalu bagaimana dua tahun ke depan kemandirian Polri? Jawabnya, pembenahan etika dan moralitas masih menjadi tantangan berat dalam pembangunan kultur baru kepolisian. Dalam Tri Brata disebutkan polisi adalah *rastra sewakottama* (abdi utama nusa dan bangsa), *nagara janotama* (warga negara teladan), dan *yana anucasana* (wajib menjaga ketertiban pribadi daripada rakyat). Meski demikian kita harus tetap optimis untuk langkah ke depan agar Polri lebih baik dari yang sekarang, terutama dalam

## BEBERAPA PERISTIWA PENTING PASKA PO

**1 Juli 2000:** Keputusan Presiden (Keppres) NO. 89/2000 dikeluarkan yang menyatakan status Polri sebagai lembaga independen yang langsung berada di bawah pengawasan Presiden RI. Sesuai dengan Keppres tersebut, Kepala Polri bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

**18 September 2000:** Presiden memberhentikan Kepala Polri Jenderal (Pol.) Roesdihardjo dan menunjuk Wakil Kepala Polri Komjen Polisi Surojo Bimantoro sebagai pelaksana harian Polri. Alasannya, Polri kurang tanggap menerjemahkan permintaan Presiden untuk menangkap Tommy Soeharto yang diduga terkait dengan berbagai kasus pengebomam. Dengan demikian, masa jabatan Roesdihardjo hanya 9 bulan.

**19 September 2000:** Kalangan DPR di luar anggota Fraksi Ke-

bangkitan Bangsa (F-KB) menolak penggantian Kepala Polri Roesdihardjo kepada Bimantoro. Alasannya, penggantian tersebut tidak sesuai dengan Tap MPR No. VIII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Dalam Tap tersebut, Presiden harus terlebih dahulu meminta persetujuan DPR dalam melakukan pergantian Kepala Polri.

**23 September 2000:** Secara mendadak Presiden melantik Wakil Kepala Polri Bimantoro sebagai Kepala Polri menggantikan Roesdihardjo. Padahal menurut rencana, penetapan Bimantoro sebagai Kepala Polri akan dibahas oleh DPR sebelum dilantik.

**2 Januari 2001:** Presiden Abdurrahman Wahid usai salat Jumat mengatakan polisi telah berhasil memerogki Tommy Soeharto. Namun, Tommy berhasil lolos karena polisi tidak segera bertindak. Polisi tersebut grogi mendengar ancaman Tommy yang mengatakan akan menyebarkan

rekaman pembicaraan antara Presiden dengan Tommy di Hotel Borobudur. Namun hal itu dibantah pihak Polri.

**2 Januari 2001:** Selama tahun 2000, polisi Jatim menembak 416 penjahat, tujuh belas di antaranya tewas. Sementara 337 lainnya luka berat dan 62 luka ringan. Demikian Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Sutanto.

**3 Januari 2001:** Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Mulyono Sulaiman mengakui pelayanan yang diberikan jajaran Polda Metro Jaya kepada masyarakat masih belum baik. Hal itu terjadi karena masih banyak anggotanya yang belum menghayati dan menjiwai tugas pokok seorang polisi.

**3 Januari 2001:** Kapolri Jenderal Bimantoro melalui telegram bernomor TR/2561/I/2001, kepada seluruh Kapolda pada 1 Januari menyampaikan perubahan sebutan kepangkatan di lingkungan Polri untuk tingkat

ke-profesionalisme-annya.

Secara perlahan tapi pasti, Institusi Kepolisian Republik Indonesia berusaha dan terus melangkah pasti, menuju masa depan sebagai polisi mandiri yang berbakti kepada Negara dan Bangsa, rakyat Indonesia tercinta.

### STRUKTUR BARU POLRI

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 54 Tahun 2001, Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara RI mengalami perubahan. Salah satu perubahan yang mendasar adalah kembali pada struktur organisasi yang lama. Struktur baru yang kemudian direvisi tetap memasukkan Wakapolri dalam struktur. Kemudian ada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Deputy Operasional, Deputy Sumber Daya Manusia, Deputy Logistik, dan Deputy Pendidikan dan Pelatihan. Jabatan tersebut akan dipegang oleh perwira tinggi dengan pangkat bintang tiga. Di bawahnya akan ada enam asisten atau wakil yang berpangkat Inspektur Jenderal atau bintang dua. Keenam yang dimaksud adalah Wakasekjen, Wairjen, Sesdeop, Sesdesumdaman, Sesdelog dan Sesdediklat.



## LRI MANDIRI

perwira menengah dan perwira pertama.

**5 Januari 2001:** Kepolisian Daerah Jawa Barat menangkap dua orang tersangka berkaitan kasus peledakan bom di Bandung. Keduanya, Musa dan Umar diciduk anggota Polres Sukabumi dari persembunyian mereka di Komplek Perumahan Cimahpar, Sukaraja, Sukabumi.

**16 Januari 2001:** Tim Pengegedah dari Polda Metro Jaya melakukan pembongkaran lantai rumah Tommy Soeharto di Jalan Cendana No. 12, Jakarta Pusat, untuk memastikan dugaan adanya ruang bawah tanah di rumah itu.

**22 Januari 2001:** Meskipun dinyatakan sudah mandiri, masyarakat bersikap pesimis apabila Polri mampu mengungkap kasus-kasus yang melibatkan petinggi negara.

**27 Januari 2001:** Kapolri Jenderal Polisi Bimantoro meresmikan terbentuknya Badan Koordinasi Narkotika

Daerah (BKND) Jatim dan Badan Penanganan dan Penanggulangan Pecandu Zat Adiktif dan Kenakalan Remaja (Bappenapzakar), di Surabaya, serta melantik pengurus BKND yang merupakan bagian dari Badan Koordinasi Narkotika Nasional. BKND Jatim diketuai oleh Kapolda Jatim Irijen Sutanto.

**25 April 2001:** Struktur Polri dipangkas oleh Presiden. Melalui Keppres No. 54 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri, posisi Wakil Kepala Polri secara resmi ditiadakan.

**1 Juni 2001:** Baru menjabat selama 8 bulan, Presiden sudah meminta Kepala Polri Bimantoro mengundurkan diri. Permintaan tersebut ditolak Bimantoro karena dianggap tidak sesuai dengan prosedur.

**2 Juni 2001:** Presiden melalui Keppres No. 40 dan 41/Polri/2001 menon-aktifkan Bimantoro dan melantik Komisaris Jenderal Polisi Chaeruddin Ismail menjadi Wakil Kepala Polri menggantikan Komjen

(Pol) Pandji Atmasudirdja.

**2 Juni 2001:** Dengan alasan tidak sesuai dengan Tap MPR No. VII/MPR/2000, kalangan DPR menolak penon-aktifan Bimantoro sebagai Kepala Polri. Pandangan tersebut ditentang oleh sebagian anggota DPR lainnya, yaitu dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

**3 Juni 2001:** Lebih dari seratus perwira tinggi dan menengah Polri menyatakan sikap menolak segala bentuk campur tangan pihak luar yang bertujuan memolitisi Polri menjadi alat pemerintah atau alat kekuasaan. Pernyataan sikap ini dinilai sebagai dukungan kepada institusi Polri yang bebas politik.

**5 Juni 2001:** Menko Polsoskam Agum Gumelar menyatakan Bimantoro akan tetap menjabat sebagai Kepala Polri sampai ia memasuki masa persiapan pensiun (MPP) bulan depan. Sementara itu, Bimantoro menyatakan masa pensiunnya jatuh pada November 2001. ■